



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partispasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, tanda terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

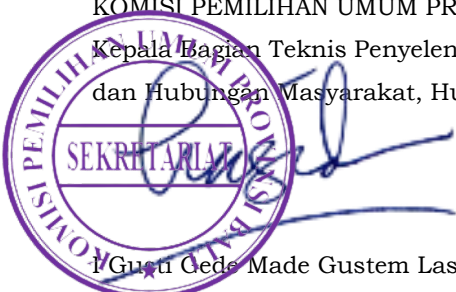
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida



SALINAN LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Bali untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Provinsi Bali tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Bali untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali secara langsung dan demokratis.
2. KPU Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Provinsi Bali yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Bali untuk melakukan pemantauan Pemilihan, selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan.

10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi Bali kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali.
11. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

A. PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Provinsi Bali mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan website KPU Provinsi Bali;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi Bali sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Bali Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU KPU Provinsi Bali yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Provinsi Bali.
6. KPU Provinsi Bali melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Provinsi Bali dapat Membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi Bali.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Bali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Bali, harus terdaftar di KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Provinsi Bali memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
4. KPU Provinsi Bali menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Provinsi Bali mengumumkan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Provinsi Bali.
6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
8. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Provinsi Bali.

D. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan KPU Provinsi Bali.
3. Syarat pendaftaran pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 Dokumen kelengkapan administrasi sebagai persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
4. Tata cara pendaftaran pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024; dan
5. Alur pendaftaran pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur J Bali ambi Tahun 2024.

E. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan;
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Provinsi Bali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud poin (1) dan (2), memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan.

4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 ditandatangani Ketua KPU Provinsi Bali.

F. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan
- d. Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- e. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- f. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi Bali; dan
- g. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 wajib:

- a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
- d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi Bali, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
- g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

G. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan; mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- b. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
- c. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
- d. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
- e. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- f. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
- h. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 menjunjung kode etik sebagai berikut:

- a. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:
 1. nonpartisan dan netral;
 2. tanpa kekerasan;
 3. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 4. sukarela;
 5. integritas;
 6. kejujuran;
 7. obyektif;
 8. kooperatif;
 9. transparan; dan
 10. kemandirian.
- b. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
- c. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

- d. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
- e. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
- f. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
- h. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
- i. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
- j. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
- k. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:

- a. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
- b. Sebelum mencabut status dan hak KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
- c. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.
- e. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
- f. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau

Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemantau Pemilihan tersebut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada KPU Provinsi Bali.
4. Apabila Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan tersebut dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

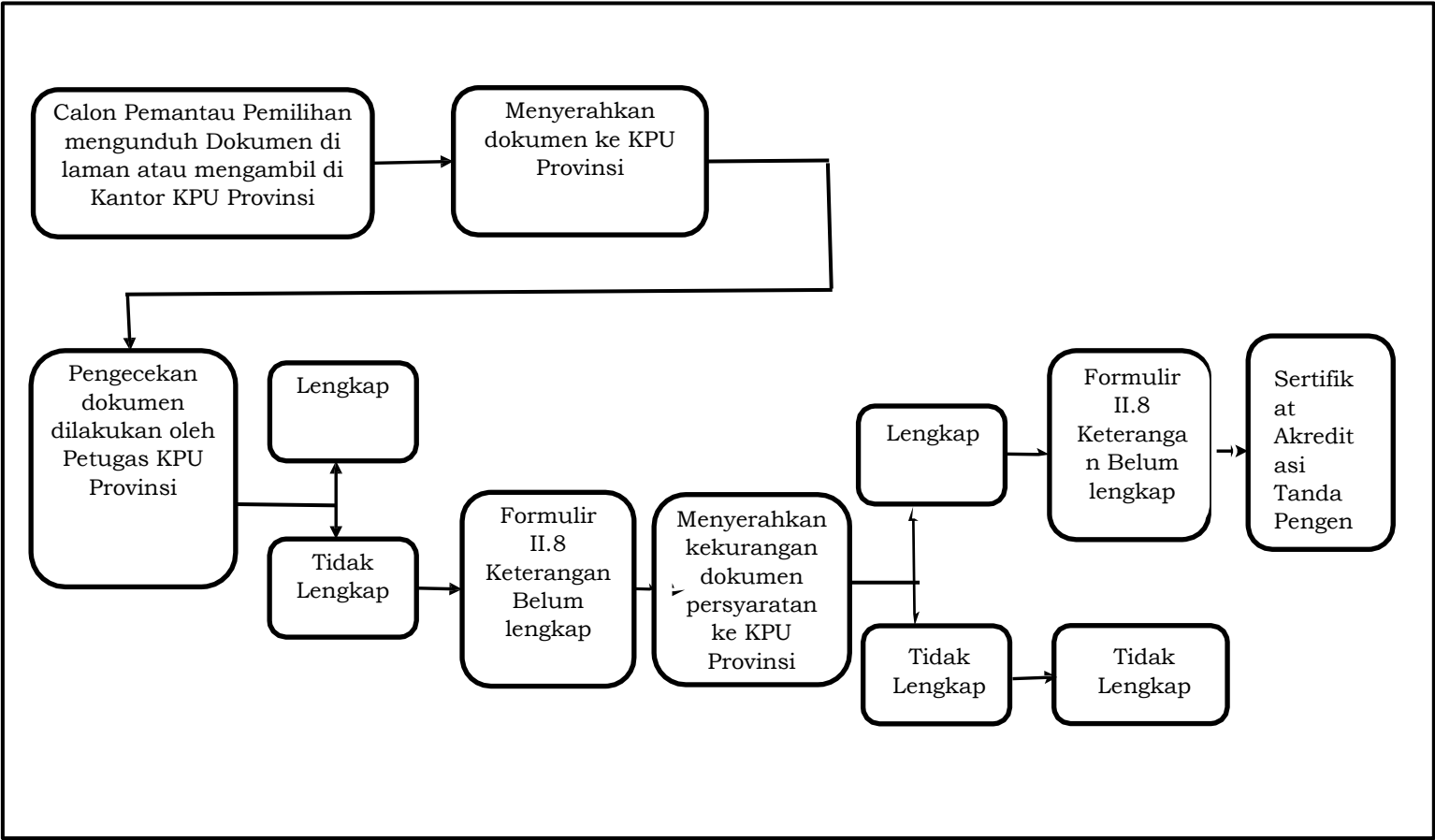
BAB III

PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi Bali, jajaran penyelenggara pemilihan, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan teknis pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Diagram

Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024



SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2024

- 1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
- 2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
- 3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN
- 4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
- 5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
- 7. Formulir II.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DAN BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI APABILA TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PEMANTAUAN PEMILIHAN
- 8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
- 9. Formulir II.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
- 10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
- 11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
- 12. SERTIFIKAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR
PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BALI

Berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lembaga Pemantau :.....
Alamat Kantor :.....
No. Telepon :.....
Alamat email :.....

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	
9.	Formulir II.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan pemantauan pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan
tahun)

Cap Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)

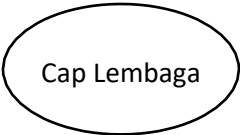
RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



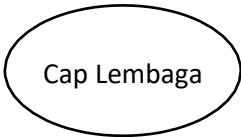
(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
PEMANTAUAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
BALI TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

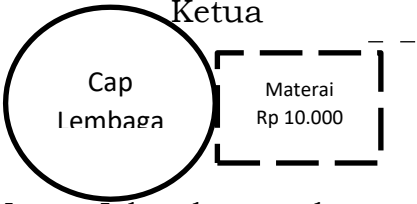
menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

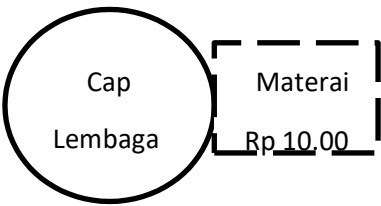
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, dengan:

- 1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- 2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
- 6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI
TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

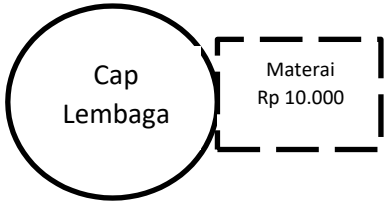
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DAN BERSEDIA DIKENAKAN
SANKSI APABILA TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI TAHUN 2024

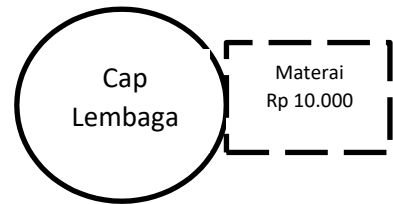
Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Bali dan bersedia dikenakan Sanksi apabila tidak menyampaikan Laporan Pemantauan Pemilihan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI BALI

Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
MENERANGKAN BAHWA :

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :
TERAKREDITASI
Menurut ketentuan peraturan perundang undangan sebagai :
PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024


Denpasar, 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI
TAHUN 2024

10 cm

15 cm



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR AKREDITASI

PAS PHOTO
4 X 6

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : SELAMA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

Denpasar, 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

15 cm

10 cm

Keterangan : Warna Merah Tua sebagai warna dasar tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau